

Nomor : 66/Surat Terbuka_JSJK/I/2009

15 Januari 2008

Hal : **Hentikan Klaim Tanah Sepihak Atas Nama Kekuasaan**

Lamp : Hasil analisis terhadap berbagai masalah Perumahan
Negara di lingkungan Dephan/TNI-POLRI

Kepada Yth,

Presiden Republik Indonesia

Bapak Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono

Di – Jakarta

Bapak Presiden yang kami hormati,

Surat ini adalah lembaran kesekian yang kami kirimkan setiap hari kamis kepada bapak presiden terkait penuntasan dan pemenuhan hak-hak korban untuk kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hari ini adalah aksi kamisan kami yang ke-95 (*sembilan puluh lima*), dalam kesempatan ini kami mengusung tema sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan dukungan dan solidaritas kepada saudara-saudara kami yang tergabung dalam *Gerakan Moral Purnawirawan Untuk Rumah* (GEMPUR). Pada akhir-akhir ini Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI serta jajarannya memiliki rencana untuk melakukan penertiban terhadap rumah-rumah dinas negara, salah satunya dilingkungan TNI. Sebagaimana terjadi pada **perumahan Dwikora yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM-39, Kota Depok, Jawa Barat**. TNI AU secara tegas menyatakan akan meminta dengan paksa para purnawirawan dan segenap penghuni rumah dinas tersebut untuk pergi mengosongkan segera tempat itu.

Tentu bisa kita bayangkan bersama, bahwa selaku warga negara yang telah berpuluh-puluh tahun menempati rumah tersebut dan taat kepada peraturan hukum yang berlaku, saat ini saudara-saudara kita tersebut harus bertahan hidup dengan segala keterbatasan, selain itu penghasilan selaku pensiunan tergolong minim sehingga tidak mencukupi untuk membeli rumah atau mengontrak tempat tinggal sekalipun. Bahkan sekarang harus dibebani dengan rencana Dephan dan TNI yang akan mengosongkan paksa rumah yang menjadi satu-satunya tempat untuk bertahan hidup yang telah ditempati sekian puluh tahun. Rumah yang saat ini kami tempati bukanlah sekadar tempat untuk berlindung dari terik matahari dan guyuran air hujan, tetapi rumah masa depan kami yang sarat nilai sejarah dan sosiologis serta ikatan psikologis. Bahkan peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi sekali, namun hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, banyak ditemukan kasus-kasus serupa yang memerlukan perhatian dari pemerintah.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Penyelesaian masalah perumahan negara yang kami tempati dengan cara penertiban yang kini sedang dilakukan oleh Dephan dan TNI bukanlah sebuah solusi yang tepat dan bijaksana. Kami sangat mengharapkan agar seyogyanya pemerintah memperhatikan kami para Purnawirawan yang rata-rata masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan kami masih mengalami teror, ancaman, dan intimidasi oleh kelompok tertentu karena kami tetap mempertahankan hak atas rumah kami. Selanjutnya kami berharap agar penyelesaian masalah ini tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Konstitusi negara kita. Demikianlah permohonan dan harapan kami, semoga karunia dan rahmat Allah SWT selalu menyertai.

Jakarta, 15 Januari 2009

JSKK,

Sumarsi

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM